

**IMPLEMENTASI PERIJINAN PADA TEMPAT HIBURAN
KARAOKE TERHADAP PASAL 47 PERDA NO.3 TAHUN 2016
TENTANG JENIS USAHA PARIWISATA YANG DILARANG
DIKABUPATEN BEKASI**

SKRIPSI

Oleh:

BUDHI HARTONO

201910115008



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERIJINAN PADA TEMPAT KARAOKE
DIHUBUNGKAN DENGAN IMPLEMENTASI
KONDISI DILAPANGAN MENGACU PADA
PERDA NO.3 TAHUN 2016 PASAL 47
TENTANG JENIS USAHA PARIWISATA YANG
DILARANG DIKABUPATEN BEKASI

Nama Mahasiswa : BUDHI HARTONO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115008

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, Juni 2023

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H
NIDN. 0428027702.


Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
NIDN. 0325117405

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERIJINAN PADA TEMPAT KARAOKE
DIHUBUNGKAN DENGAN
IMPLEMENTASI KONDISI
DILAPANGAN MENGACU PADA
PERDA NO.3 TAHUN 2016 PASAL 47
TENTANG JENIS USAHA PARIWISATA
YANG DILARANG DIKABUPATEN
BEKASI.

Nama Mahasiswa : BUDHI HARTONO
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115008
Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 18 Juli 2023

Bekasi, Juli 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H
NIDK. 8937370023

Penguji I : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum
NIDN. 0325117405

Penguji II : Aly Ashghor, MA.Pol., M.Sos
NIDN. 0311038802

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Mitriana, S.H., M.H
NIDN . 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : PERIJINAN PADA TEMPAT KARAOKE
DIHUBUNGKAN DENGAN IMPLEMENTASI
KONDISI DILAPANGAN MENGACU PADA
PERDA NO.3 TAHUN 2016 PASAL 47
TENTANG JENIS USAHA PARIWISATA YANG
DILARANG DIKABUPATEN BEKASI

Nama : BUDHI HARTONO
NPM : 201910115008
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perijinan Pada Tempat Karaoke Dihubungkan Dengan Implementasi Kondisi Dilapangan Mengacu Pada Perda No.3 Tahun 2016 Pasal 47 Tentang Jenis Usaha Pariwisata Yang Dilarang Dikabupaten Bekasi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Budhi Hartono

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budhi Hartono

NPM : 201910115008

TTL :

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERIJINAN PADA TEMPAT KARAOKE DIHUBUNGKAN DENGAN IMPLEMENTASI KONDISI DILAPANGAN MENGACU PADA PERDA NO.3 TAHUN 2016 PASAL 47 TENTANG JENIS USAHA PARIWISATA YANG DILARANG DIKABUPATEN BEKASI”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Yang membuat



Budhi Hartono

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata perlu disesuaikan dengan perkembangan kepariwisataan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu diganti, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Hal ini karena Perda ini memuat beberapa pasal bermasalah, seperti pasal 47 ayat (1) ini yang mengalami penolakan dari sejumlah pengusaha pariwisata. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen atau kepustakaan.

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) penegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Bekasi masih terdapat inkonsistensi dan kekosongan hukum yang mengakibatkan penegakan Perda menjadi kurang maksimal. Untuk mencegah hal ini, tentunya diperlukan kejelasan dalam perizinan THM yang diajukan dalam TDUP di kabupaten Bekasi. Akan tetapi, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tidak mengatur lebih lanjut mengenai substansi dan tata cara pendaftaran TDUP tersebut. 2) Hambatan dan tantangan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Bekasi adalah Perda ini memiliki beberapa potensi pelanggaran seperti melanggar asas pembentukan peraturan daerah dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum dan melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan kewajiban pemerintah daerah.

Kata kunci: Perda Nomor 3 Tahun 2016, Bekasi, Penutupan Hiburan Malam

ABSTRACT

Bekasi Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Tourism Organization needs to be adjusted to tourism developments and statutory provisions need to be replaced, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Tourism Implementation. This is because this regional regulation contains several problematic articles, such as article 47 paragraph (1) which has experienced rejection from a number of tourism entrepreneurs. The research method used in this study is a normative juridical method by studying documents or literature.

The results of the study found that 1) law enforcement against violations of Regional Regulation Number 3 of 2016 in Bekasi Regency still has inconsistencies and a legal vacuum which results in the enforcement of the Regional Regulations being less than optimal. To prevent this, of course, clarification is needed in the THM permits submitted in the TDUP in Bekasi district. However, the Bekasi Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 does not further regulate the substance and procedure for registering the TDUP. 2) Obstacles and challenges in running

Regional Regulation Number 3 of 2016 in Bekasi Regency is that this Regional Regulation has several potential violations such as violating the principles of forming regional regulations and the formation of laws and regulations in general and violating human rights and contradicting the obligations of the local government.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PERIJINAN PADA TEMPAT KARAOKE DIHUBUNGKAN DENGAN IMPLEMENTASI KONDISI DILAPANGAN MENGACU PADA PERDA NO.3 TAHUN 2016 PASAL 47 TENTANG JENIS USAHA PARIWISATA YANG DILARANG DIKABUPATEN BEKASI”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. DR. Gatot Efrianto, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi
5. Dr. Noviriska, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4. Kerangka Konseptual	9
1.5. Kerangka Teoritis	7
1.6. Kerangka Pemikiran	16
1.7. Penelitian Terdahulu	17
1.8. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1. Otonomi Daerah	24
2.2. Peraturan Daerah	26
2.3. Pelaksanaan Peraturan Dearah	31
2.4. Penegakan Huku Peraturan Dearah	32
2.5. Usaha Pariwisata	33
BAB III OBJEK PENELITIAN	35
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Bekasi	35
3.2. Usaha Pariwisata di Kabupaten Bekasi	42

3.3. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Bekasi.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Analisa Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Di Kabupaten Bekasi.....	49
4.2. Hambatan Dan Tantangan Dalam Menjalankan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Di Kabupaten Bekasi	61
4.3. Penegakan Hukum Seorang Profesi Apoteker Yang Melakukan Layanan Penjualan Vaksin Kadaluwarsa	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk negara dan bangsa. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada semua anak yang ada di Indonesia agar selalu berjuang dan semangat dalam belajar demi masa depan yang cerah. Terima Kasih.

